

DSAK Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis IAI atas pembahasan agenda dalam rapat atau aktivitas DSAK IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAK Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAK IAI. Keputusan final DSAK IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAK IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk SAK dan produk lain terkait dengan SAK

Daftar Topik

- 1 Penyusunan SAK
- 2 Penerbitan *Buletin Implementasi*
- 3 Kajian Akuntansi Jaminan Sosial
- 4 Implementasi SAK
- 5 Sosialisasi SAK
- 6 *Stakeholders Management*
- 7 Tanggapan IASB & IFRIC
- 8 Aktivitas Internasional

1. PENYUSUNAN SAK

a **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan**

Pada 28 Mei 2025 DSAK IAI mengesahkan PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* yang merujuk pada IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

PSAK 118 bertujuan untuk meningkatkan komunikasi perusahaan kepada investor melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan akan menggantikan PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*. PSAK 118 mengakibatkan perubahan besar pada bagian laba rugi dan catatan atas laporan keuangan khususnya terkait ukuran kinerja tetapan manajemen.

Berita pengesahan PSAK 118 dapat diakses melalui tautan [Pengesahan PSAK 118](#)

b **PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan**

Pada 27 Agustus 2025 DSAK IAI mengesahkan PSAK 119: *Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan* yang merujuk pada IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*.

PSAK 119 bertujuan untuk mengurangi ketentuan pengungkapan yang diatur di PSAK lain. PSAK ini diterapkan oleh entitas anak yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai SAK Indonesia, SAK Internasional, atau IFRS Accounting Standards. Entitas anak yang menerapkan PSAK 119 akan menyusun laporan keuangan dengan membuat pengungkapan sesuai PSAK 119.

Selanjutnya pada 24 November 2025 DSAK IAI mengesahkan amendemen atas PSAK 119 yang merujuk pada Amendemen IFRS 19 yang diterbitkan IASB pada 21 Agustus 2025. Amendemen ini seiring perubahan dan konsistensi dengan pengaturan dalam SAK Indonesia. PSAK 119 dan amendemennya akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Berita pengesahan PSAK 119 serta amendemen PSAK 119 dapat diakses melalui tautan [Pengesahan PSAK 119](#) dan [Pengesahan Amendemen PSAK 119](#)

c PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Pada 29 Oktober 2025 DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali*. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari *Post Implementation Review* (PIR) PSAK 338 melalui penerbitan “Discussion Paper PIR PSAK 338” dan diskusi kelompok terfokus (FGD) pada Mei hingga Desember 2024 dengan regulator, akuntan publik, dan pelaku bisnis.

Revisi ini mencakup pengecualian bagi entitas investasi, perubahan rujukan terhadap basis pengukuran dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan, dan pengungkapan yang relevan. PSAK 338 (2025) berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berita pengesahan PSAK 338 (2025) dapat diakses melalui tautan [Pengesahan PSAK 338 \(Revisi 2025\)](#)

d Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107

Pada 7 Agustus 2025 DSAK IAI mengesahkan Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam*. Amendemen tersebut merujuk pada Amendemen IFRS 9 dan IFRS 7 tentang *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity* dan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 memberikan panduan mengenai “penggunaan sendiri” dan penerapan akuntansi lindung nilainya.

Berita pengesahan Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 dapat diakses melalui tautan [Pengesahan Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107](#)

e Dengar Pendapat

Selama tahun 2025, DSAK IAI melakukan berbagai dengar pendapat publik secara daring sebagai bagian dari *due process procedure* penerbitan SAK.

Dengar Pendapat Publik DE PSAK 119 dan DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107

Acara ini dilakukan pada 15 Mei 2025 dengan peserta sekitar 300 orang.

The slide illustrates the background and solution for financial reporting consolidation. It features a diagram with two main boxes: 'ENTITAS INDUK' (Parent Entity) and 'ENTITAS ANAK' (Subsidiary Entity). Arrows indicate the flow of financial reporting from the subsidiary to the parent. Text boxes describe the process: the parent entity consolidates financial reports using SAK Indonesia, and the subsidiary entity reports financials using SAK Indonesia. A specific box for 'Laporan Keuangan Entitas Anak' (Subsidiary Entity Financial Report) mentions applying SAK Indonesia with disclosure requirements according to DE PSAK 119. The slide also includes logos for IAI, IFAC, and a 'SEE BEYOND THE NUMBERS' banner. A small video inset shows a woman speaking. The footer contains the website www.iaiglobal.or.id, social media links, and a contact number 08 111 055 141.

Berita dan materi DE dapat diunduh melalui tautan [Dengar Pendapat Publik DE PSAK 119 dan Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107](#)

Dengar Pendapat Publik DE PSAK 338

Acara ini dilakukan secara daring pada 12 September 2025 yang diikuti oleh sekitar 500 peserta.

IKHTISAR	
RUANG LINGKUP	Tidak diterapkan pada kombinasi bisnis antar entitas sepengendali yang dilakukan oleh entitas investasi.
DEFINISI	Menambahkan definisi: bisnis alihan, entitas penerima dan entitas pengalih.
ENTITAS PENERIMA	- Jumlah tercatat di entitas pengalih. - Jika tidak praktis, jumlah tercatat berdasarkan laporan keuangan bisnis alihan.
ENTITAS PENGALIH	Jumlah tercatat di entitas pengalih.
INFORMASI PRAKOMBINASI NISNIS	- Informasi prakombinasi bisnis disajikan sejak terjadi sepengendali. - Jika tidak praktis, informasi prakombinasi bisnis tidak disajikan.
PENGUNGKAPAN	Menambahkan pengungkapan karena penerapan ketidakpraktisan.

Materi presentasi ini tidak dimaksudkan menyajikan seluruh pengaturan / perubahan secara rinci dalam DE PSAK 338

Berita dan materi DE dapat diunduh melalui tautan [Dengar Pendapat Publik DE PSAK 338](#)

Dengar Pendapat Publik DE PSAK 119

Acara ini dilakukan pada 14 Oktober 2025 secara daring yang diikuti oleh sekitar 184 peserta.

DE AMENDEMENT PSAK 119:
ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN
Oleh. Bapak Dede Rusli

Berita dan materi DE dapat diunduh melalui tautan [Dengar Pendapat Publik DE PSAK 119](#)

Dengar Pendapat Terbatas DE PSAK 118

Acara ini dilakukan tiga kali yaitu pada 31 Januari 2025 dengan perwakilan regulator, 7 Februari 2025 dengan perwakilan kantor akuntan publik dan asosiasi profesi, dan 13 Februari 2025 dengan perwakilan investor dan penyusun laporan keuangan.

2. PENERBITAN BULETIN IMPLEMENTASI

Selama tahun 2025, DSAK IAI menerbitkan *Buletin Implementasi* (BI) Volume 6-11. Isu implementasi akuntansi dalam BI merupakan isu internasional yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision dan isu lokal. BI memberikan penjelasan cara penerapan ketentuan SAK pada pola fakta tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Bulan	Volume	Tautan
Agustus 2025	BI Volume 6 BI ini menjelaskan panduan dalam memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 208, khususnya ketika tidak terdapat pengaturan spesifik dalam SAK Indonesia. BI ini menyajikan proses tiga langkah untuk mengembangkan kebijakan akuntansi.	BI Volume 6
September 2025	BI Volume 7 BI ini membahas isu akuntansi terkait iklim, jaminan yang diterbitkan atas kewajiban entitas lain, pembayaran yang bergantung pada keberlanjutan hubungan kerja, pengungkapan pendapatan dan beban untuk segmen dilaporkan, dan lain-lain.	BI Volume 7
September 2025	BI Volume 8 BI ini memberikan penjelasan akuntansi atas kepemilikan dan penitipan aset kripto.	BI Volume 8
Oktober 2025	BI Volume 9 BI ini memberikan panduan identifikasi risiko dan persyaratan 'highly probable' yang dapat ditetapkan sebagai <i>hedged item</i> dan lain-lain.	BI Volume 9
Desember 2025	BI Volume 10 (Kodifikasi) BI ini merupakan kompilasi dari berbagai produk non-standar yang dikeluarkan DSAK IAI sebelum Februari 2023 yang mencakup siaran pers, buletin teknis, dan materi edukasi. BI ini memuat berbagai topik antara lain: • Akuntansi penyaluran dana PKBL oleh BUMN. • Revaluasi aset tetap. • Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 210 dan PSAK 109. • Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 113. • Pelepasan HGB di atas HPL. • Pengatribusian imbalan pada periode jasa.	BI Volume 10
Desember 2025	BI Volume 11 BI ini memberikan penjelasan mengenai pengukuran awal instrumen utang dengan suku bunga di bawah suku bunga bebas risiko.	BI Volume 11

3. KAJIAN AKUNTANSI JAMINAN SOSIAL

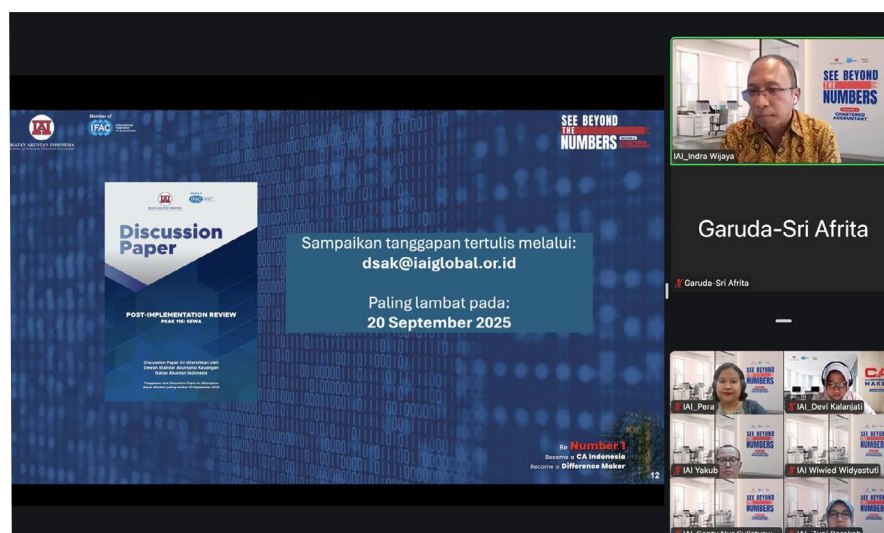
Penerapan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* pada program asuransi sosial menghadapi tantangan dan kompleksitas. DSAK IAI menyelenggarakan kajian PSAK asuransi sosial melalui 11 kali FGD dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pengelola, akademisi, dan regulator, untuk menggali konsep dan praktik penyelenggaraan asuransi sosial di Indonesia. Asuransi sosial bersifat wajib, nirlaba, dan berorientasi pada perlindungan sosial, dengan pengelolaan risiko secara kolektif serta intervensi pemerintah yang signifikan. Karakteristik ini berbeda secara mendasar dari kontrak asuransi dalam PSAK 117. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk menentukan model akuntansi yang sesuai untuk program asuransi sosial.



4. IMPLEMENTASI SAK

a PSAK 116: Sewa

Dalam rangka mengevaluasi penerapan PSAK 116: *Sewa* DSAK IAI menerbitkan “*Discussion Paper* PIR PSAK 116” pada Agustus 2025. Tujuannya untuk melihat sejauh mana PSAK 116 telah memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan.



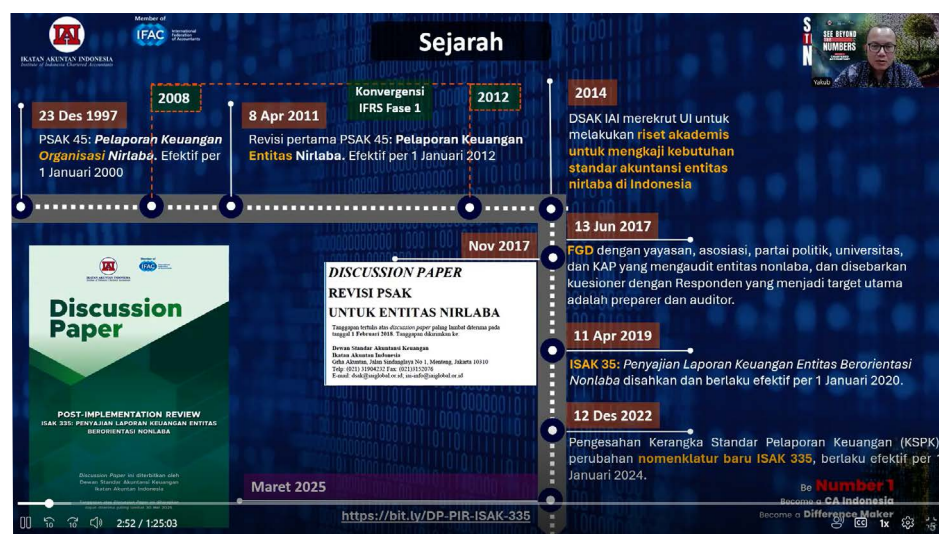
DSAK IAI juga melakukan FGD secara daring pada 25 Agustus 2025. FGD ini diikuti oleh akuntan publik dan praktisi bisnis telekomunikasi, teknologi digital, transportasi, logistik, energi, kelistrikan, pertambangan, hingga ritel. Secara umum PSAK 116 telah sesuai dengan tujuannya dan tidak teridentifikasi adanya isu fatal dari pengaturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa area yang masih memerlukan klarifikasi untuk meningkatkan konsistensi dan kebergunaan. Area tersebut mencakup penentuan jangka waktu sewa, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara perspektif keberlakuan hukum (*legal enforceability*) dan implikasi ekonomi yang lebih luas; interaksi antara PSAK 116 dan PSAK 115 dalam transaksi jual-beli dan sewa balik ketika pengendalian dialihkan sepanjang waktu; serta perbedaan antara transaksi sewa dan transaksi jual atau beli.

Berita dan materi *discussion paper* dapat diunduh melalui tautan [PIR PSAK 116](#)

b ISAK 335: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*

Dalam rangka menelaah secara mendalam penerapan atau PIR ISAK 335 pada Maret 2025 DSAK IAI menerbitkan “*Discussion Paper* PIR ISAK 335”. Tujuannya untuk memperoleh tanggapan publik apakah penerapan pengaturan dalam ISAK 335 telah sesuai dengan tujuannya. DSAK IAI juga menyelenggarakan dua kali FGD pada 22 April 2025 dan 14 Mei 2025 yang masing-masing diikuti oleh sekitar 25 peserta dari organisasi nonlaba dan filantropi, akademisi, akuntan publik, asosiasi profesi akuntan, media dan komunikasi.

Hasil FGD menunjukkan adanya sejumlah isu penerapan, khususnya terkait konsistensi penyajian laporan keuangan dan kebutuhan klarifikasi tertentu. Namun, sebagian besar isu tersebut tidak mencerminkan permasalahan konsep dalam standar, melainkan berkaitan dengan praktik penyajian, kebutuhan pelaporan khusus donor, perbedaan terminologi fiskal, keterbatasan sumber daya manusia, serta pemahaman atas contoh ilustratif yang memang tidak dimaksudkan dapat mencakup seluruh kondisi. Isu lainnya, seperti klasifikasi aset neto, penamaan laporan, interaksi dengan PSAK lain, dan kebutuhan informasi tambahan, pada prinsipnya telah diatur dalam standar atau dapat diselesaikan melalui pengungkapan yang memadai dan laporan bertujuan khusus.



Berita dan materi *discussion paper* dapat diunduh melalui tautan [PIR ISAK 335](#)

c PSAK 117: Kontrak Asuransi

DSAK IAI terlibat aktif dalam diskusi kelompok kerja implementasi PSAK 117 yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sepanjang tahun 2025 DSAK IAI telah menghadiri 15 rapat tim implementasi PSAK 117 bersama OJK, Kementerian Keuangan, AAUI, AAJI, PAI, IAPI, dan perusahaan asuransi yang membahas isu implementasi PSAK 117. Fokus isu akuntansi mencakup delapan isu implementasi, yaitu pertimbangan risiko kredit pada piutang premi, pengalihan portofolio kontrak asuransi, pendekatan transisi menggunakan pendekatan nilai wajar, *illiquidity premium* dalam tingkat diskonto, *non-performing risk* dari reasuradur dalam pengukuran kontrak reasuransi milikan, kontrak yang berlaku surut, biaya yang dapat diatribusikan, dan penentuan arus kas pemenuhan.



5. SOSIALISASI SAK

a Sosialisasi PSAK 118

Sosialisasi PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan* dilakukan secara daring pada 2 Juli 2025. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pemangku kepentingan dalam menerapkan PSAK 118. Kegiatan ini menghadirkan Indra Wijaya sebagai narasumber, yang memaparkan latar belakang, ruang lingkup, serta perubahan utamanya.

IFRS 18: Presentation and Disclosure in Financial Statements

Latar belakang:

- IFRS 18 merupakan respon IASB atas permintaan pemangku kepentingan (investor) untuk meningkatkan pelaporan kinerja keuangan entitas.
- Laporan laba rugi bervariasi struktur dan isi
- Kurangnya transparansi atas ukuran kinerja tetapan manajemen (non-GAAP measures)
- Beberapa entitas tidak menyediakan informasi detail yang cukup dan informasi penting terkadang tidak jelas (obscured).

IFRS 18 berdampak pada seluruh perusahaan di seluruh industri.

Walaupun tidak memengaruhi bagaimana kinerja keuangan diukur, namun akan memengaruhi **penyajian dan pengungkapannya**.

IFRS 18

- Persyaratan baru struktur dan isi laporan keuangan + persyaratan IAS 1 yang relevan
- Persyaratan lain dalam IAS 1 akan masuk dalam IAS 8
- Judul IAS 8 menjadi **Basis of Preparation of Financial Statements**

Amendemen IFRS, IAS, IFRIC dan SIC terkait:

- Klasifikasi dalam laporan laba rugi
- Referensi ke standar lain

www.iaiglobal.or.id

b Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 6-7

Acara ini dilakukan pada 12 September 2025 secara daring dengan peserta sekitar 500 orang. Indra Wijaya, Irwan Lau, Aria Farah Mita, Elisabeth Imelda, dan Zuni Barokah secara bergantian menyampaikan isi BI Volume 6-7 serta merespon pertanyaan dari peserta secara langsung.

Bagian 1

PEMAPARAN OLEH IBU ZUNI BAROKAH

BI Vol. 6:

- PSAK 208: Panduan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi

BI Vol. 7:

- PSAK 237: Komitmen terkait iklim
- PSAK 238: Pengakuan aset takberwujud dari pengeluaran terkait iklim

www.iaiglobal.or.id

WA OFFICIAL IAI 08 111 055 141

c Sosialisasi Buletin Implementasi Volume 8-9

Acara ini dilakukan pada 14 Oktober 2025 secara daring dengan peserta sekitar 184 orang. Indra Wijaya, Dede Rusli, dan Elisabeth Imelda menjelaskan isi BI Volume 8-9 serta merespon pertanyaan dari peserta secara interaktif.

Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas

PSAK 202, PSAK 238

Bagaimana mencatat aset kripto yang dimiliki entitas?

POLA FAKTA – KARAKTERISTIK ASET KRIPTO YANG DIKUASAI ENTITAS*

Mata uang digital/virtual yang tercatat di buku besar terdistribusi yang menggunakan kriptografi	Tidak diterbitkan oleh otoritas yurisdiksi atau pihak lain	Tidak menimbulkan kontrak antara pemegangnya dan pihak lain
--	--	---

* Buletin Implementasi Vol. 8 menggunakan istilah "aset kripto" dengan karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut merujuk pada IFRIC AD (Juni 2019). Sedangkan IFRIC AD menggunakan istilah "cryptocurrency".

www.iaiglobal.or.id

WA OFFICIAL IAI 08 111 055 141

d RAD “Entitas Investasi”

IAI mengadakan *Regular Accounting Discussion* (RAD) secara daring dengan tema “Penerapan Akuntansi Entitas Investasi” pada 30 April 2025 dan diikuti oleh sekitar 300 peserta dengan narasumber Irwan L. Lau. RAD dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi atas perlakuan akuntansi relevan yang sesuai dengan substansi transaksi dalam kelompok usaha berskala besar yang memiliki struktur kepemilikan kompleks dengan portofolio investasi beragam.



e Bimbingan Teknis “Aset Kripto”

IAI dan OJK memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan aset kripto di Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akuntansi aset kripto yang diselenggarakan di Jakarta, dengan melibatkan perwakilan pedagang aset kripto, akuntan publik, dan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.



Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama IAI dan OJK untuk mendorong implementasi *Buletin Implementasi* Volume 8 yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada 27 Agustus 2025. Panduan ini menjadi tonggak penting bagi penyusunan laporan keuangan yang andal dan konsisten di sektor aset kripto, sektor yang terus berkembang pesat sejalan dengan transformasi digital sistem keuangan nasional.



Melalui kolaborasi strategis antara IAI, OJK, dan para pelaku industri, Indonesia kini memiliki acuan akuntansi aset kripto yang kredibel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bagi perusahaan, auditor, regulator, serta penyusun laporan keuangan dalam memastikan konsistensi, keandalan, dan integritas pelaporan di sektor aset kripto.

6. STAKEHOLDERS MANAGEMENT

Selama tahun 2025 DSAK IAI melakukan diskusi dengan berbagai *stakeholders* untuk penguatan ekosistem pelaporan keuangan antara lain:

a Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada 14 Mei 2025 DSAK IAI menghadiri undangan FGD dari OJK terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang diwakili oleh Aria Farah Mita. Diskusi ini melibatkan OJK serta perwakilan industri LKM dan bertujuan untuk memperoleh pandangan IAI mengenai penerapan standar akuntansi yang paling tepat bagi LKM. Dalam forum tersebut, dibahas antara lain penerapan SAK EMKM atau SAK EP bagi industri LKM, kemungkinan penggunaan kembali SAK EMKM bagi LKM yang sebelumnya telah menerapkan SAK ETAP, serta mekanisme dan implikasi penggunaan SAK EP terhadap pelaporan keuangan LKM.

b Australian Accounting Standards Board (AASB)

Pada 23 Mei 2025 DSAK IAI dan DSK IAI melaksanakan pertemuan dengan Keith Kendall, ketua AASB. Pertemuan ini membahas perkembangan standar akuntansi terkini di Indonesia dan Australia, sekaligus membahas potensi kerja sama antara IAI dan AASB.

c Kementerian Keuangan

Pelaporan Keuangan Program Asuransi Sosial

DSAK IAI terlibat dalam rangkaian diskusi mengenai pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pembahasan aset BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan pada 10 dan 12 November 2025 dengan melibatkan beberapa pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, IAPI, dan lainnya yang mengulas RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 99 Tahun 2013. Selanjutnya, pada 28

November 2025, DSAK IAI turut serta dalam pertemuan harmonisasi RPP Perubahan Ketiga atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Dalam seluruh diskusi tersebut, DSAK IAI berpandangan bahwa PSAK 117: *Kontrak Asuransi* yang merujuk pada IFRS 17 tidak secara khusus diintensikan untuk jaminan sosial, sehingga secara substansi jaminan sosial tersebut mungkin tidak sama persis dengan kontrak asuransi dalam PSAK 117. Jika entitas menerapkan modifikasi, maka laporan keuangan yang disajikan merupakan laporan keuangan bertujuan khusus.

Taksonomi Nasional

Pada 5 Desember 2025 DSAK IAI yang diwakili oleh Indra Wijaya menghadiri FGD mengenai taksonomi nasional laporan keuangan. FGD ini juga dihadiri oleh BEI, OJK, Ditjen Pajak, akademisi, dan konsultan pengembang sistem. Dalam forum ini, DSAK IAI mendorong agar pengembangan taksonomi nasional dapat mempertimbangkan SAK Indonesia terkini dan *IFRS Taxonomy* sebagai rujukan.

Laporan Keuangan Danantara

DSAK IAI yang diwakili oleh Elisabeth Imelda dan Aria Farah Mita mengikuti pertemuan pada 10 dan 29 Desember 2025 terkait pelaporan keuangan BPI Danantara dan BUMN dalam laporan keuangan pemerintah pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025. Diskusi ini mencakup dampak regulasi terhadap kewenangan dan pelaporan investasi pemerintah, mekanisme PMN, harmonisasi SAP dan SAK, serta mitigasi risiko audit dalam rangka mendukung pelaporan keuangan yang akuntabel.

7. TANGGAPAN IASB & IFRIC

Selama Januari s.d. Desember 2025 DSAK IAI telah memberikan tanggapan atas publikasi IASB, IFRIC dan lainnya sebagai berikut:

Tanggal	Judul Dokumen	Tautan Tanggapan DSAK IAI
20 Januari 2025	<i>Exposure Draft: Equity Method of Accounting—IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures</i> Materi atas ED dapat diunduh melalui tautan IFRS - Exposure Draft and comment letters: IAS 28	Comment on the IASB's ED: Equity Method
24 Januari 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Assessing Indicators of Hyperinflationary Economies (IAS 29)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS - Tentative Agenda Decision and comment letters: IAS 29	Comment on the IFRIC's TAD on IAS 29
24 Januari 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Recognition of Intangible Assets Resulting from Climate-related Expenditure (IAS 38)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS - Tentative Agenda Decision and comment letters: IAS 38	Comment on the IFRIC's TAD on IAS 38
12 Maret 2025	<i>Exposure Draft: Provisions—Targeted Improvements</i> Materi atas ED dapat diunduh melalui tautan IFRS - Exposure Draft and comment letters: Provisions—Targeted Improvements	Comment on the IASB's ED on Provisions – Targeted Improvements

Tanggal	Judul Dokumen	Tautan Tanggapan DSAK IAI
6 Oktober 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Embedded Prepayment Option (IFRS 9)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS – Tentative Agenda Decision and comment letters: Embedded Prepayment Option IFRS 9	Comment on the IFRIC's TAD on IFRS 9 - Embedded Prepayment Option
6 Oktober 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Determining and Accounting for Transaction Costs (IFRS 9)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS – Tentative Agenda Decision and comment letters: Determining and Accounting for Transaction Costs (IFRS 9)	Comment on the IFRIC's TAD on IFRS 9 - Determining and Accounting for Transaction Costs
6 Oktober 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Updates to Committee's agenda decisions for IFRS 18</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS – Tentative Agenda Decision and comment letters: IFRS 18	Comment on the IFRIC's TAD on IFRS 18
15 Oktober 2025	<i>Request for Information: Post-implementation Review of IFRS 16 Leases</i> Materi atas PIR dapat diunduh melalui tautan IFRS – PIR IFRS 16	Comments PIR IFRS 16
25 November 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Economic Benefits from Use of a Battery under an Offtake Arrangement (IFRS 16)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS – Tentative Agenda Decision and comment letters: IFRS 16	Comment on the IFRIC's TAD on IFRS 16
25 November 2025	<i>Tentative Agenda Decision: Classification of a Foreign Exchange Difference from an Intragroup Monetary Liability (or Asset) (IFRS 18)</i> Materi atas TAD dapat diunduh melalui tautan IFRS – Tentative Agenda Decision and comment letters: Classification of a Foreign Exchange (IFRS 18)	Comment on the IFRIC's TAD on IFRS 18

8. AKTIVITAS INTERNASIONAL

Sepanjang tahun 2025, DSAK IAI secara konsisten terlibat aktif dalam berbagai forum internasional, antara lain IFASS, WSS, AOSSG, dan EEG. Partisipasi tersebut mencerminkan komitmen DSAK IAI dalam mendukung implementasi standar akuntansi internasional serta memperkuat peran Indonesia di tengah komunitas global penyusun standar akuntansi.

a. IFASS Meeting

Aria Farah Mita dan Elisabeth Imelda menghadiri pertemuan International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) secara daring pada 12-14 Maret 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis dalam pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan di tingkat global. Pembahasan pelaporan keuangan mencakup pelaporan arus kas, metode ekuitas, provisi, IFRS for SMEs, aset takberwujud, serta konsistensi penerapan standar dan peran IFRIC. Selain itu, peserta memperoleh agenda kerja IASB terkini dan berbagi pengalaman implementasi standar di berbagai yurisdiksi, dll.



(Sumber gambar: <https://www.efrag.org/>)

b. AOSSG, WSS & IFASS Meeting

Indra Wijaya menghadiri pertemuan AOSSG Interim, WSS, dan IFASS di London, Inggris pada 28 September s.d. 1 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, topik yang dibahas antara lain adalah IASB *update*, *financial instruments with characteristics of equity*, penerapan IFRS Accounting Standards secara konsisten melalui IFRIC Agenda Decisions, konektivitas antara laporan keuangan & pengungkapan keberlanjutan, *practice statement* tentang *management commentary*, IFRS 19, IFRS for SMEs, *overview* dan implementasi IFRS 18, dll.

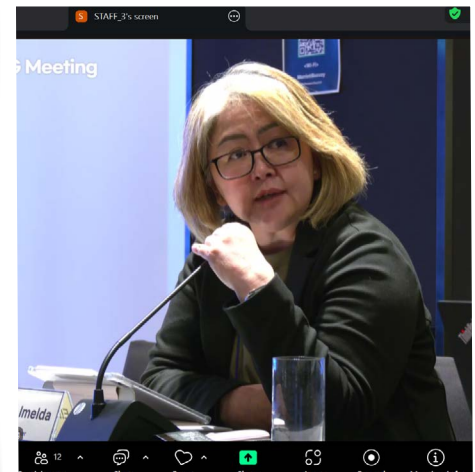


c. EEG Meeting

Selama tahun 2025, DSAK IAI menghadiri dua kali pertemuan Emerging Economies Group (EEG). Pertemuan EEG pada tengah tahun pertama dihadiri oleh Irwan Lau dan Elisabeth Imelda secara daring pada 7-8 Mei 2025. Beberapa topik yang dibahas antara lain mengenai IASB *update*, pembahasan konsultasi agenda kerja IASB, *second comprehensive review of IFRS for SMEs*, *financial instruments with characteristics of equity*, *hiperinflasi*, dll.



Pertemuan EEG berikutnya dilaksanakan pada 3-4 November 2025. Elisabeth Imelda menghadiri pertemuan EEG tersebut di Seoul, Korea Selatan. Beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain pengalaman praktik dalam penerapan IFRS 18 di Afrika Selatan, proyek aset takberwujud dalam rangka mengeksplorasi kemungkinan pembaruan definisi aset takberwujud, panduan terkait, serta beberapa aspek kriteria pengakuannya serta kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan sehubungan dengan aset takberwujud, metode ekuitas khususnya mengenai keringanan untuk mengukur tambahan bagian investor atas aset neto entitas asosiasi pada nilai wajar ketika memperoleh kepentingan tambahan, pengukuran biaya amortisasian dalam IFRS 9, dan lain-lain.



d. 17th AOSSG Annual Meeting

Pada 27-28 November 2025, DSAK IAI kembali menunjukkan perannya di kancah internasional melalui partisipasi aktif dalam 17th Annual Meeting Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) yang berlangsung di Villa Nautica, Maldives. Acara ini diselenggarakan secara langsung oleh Institute of Chartered Accountants of the Maldives (CA Maldives) pada tanggal 27-28 November 2025.

Dalam pertemuan ini, Irwan L. Lau hadir untuk berkontribusi dalam diskusi strategis mengenai pengembangan standar akuntansi yang berlaku di kawasan Asia Oseania. Selama dua hari, para peserta yang berasal dari berbagai negara anggota AOSSG mengikuti berbagai sesi teknis dan khusus, seperti *update* IASB, metode ekuitas, serta diskusi mendalam mengenai penerapan IFRS di berbagai yurisdiksi, dll.



(Sumber gambar: psmnews.nv)

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DSAK IAI dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan Kerangka Konseptual, SAK dan produk lain terkait dengan SAK mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI.

Beberapa kewenangan dan tanggung jawab DSAK IAI, misalnya untuk:

- 1 Melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan Kerangka Konseptual, SAK dan produk lain terkait dengan SAK.
- 2 Menjawab pertanyaan dari publik yang terkait dengan Kerangka Konseptual, SAK dan produk lain terkait dengan SAK dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAK IAI.
- 3 Aktif berkontribusi dalam pembahasan isu-isu pengembangan dan implementasi SAK di berbagai forum regional dan internasional.



Indra Wijaya (Ketua)
KPMG Indonesia



Alexander A. Tjahyadi (Anggota)
BDO Indonesia



Aria Farah Mita (Anggota)
Universitas Indonesia



Bahrudin (Anggota)
Ex-officio OJK Perbankan



Dede Rusli (Anggota)
Ernst & Young Indonesia



Devi S. Kalanjati (Anggota)
Universitas Airlangga



Dini Rosdini (Anggota)
Universitas Padjadjaran



Elisabeth Imelda (Anggota)
Deloitte Indonesia



Endro Wahyono (Anggota)
PT Astra International Tbk



Irwan Lawardy Lau (Anggota)
PricewaterhouseCoopers Indonesia



Muhammad Maulana (Anggota)
Ex-officio OJK Pasar Modal



Nurhasan (Anggota)
Ex-officio OJK IKNB



Zuni Barokah (Anggota)
Universitas Gadjah Mada



Gedung Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664